



Keputusan Wali Kota
No. 000.7.2 / 273 / 2026

Lampiran VIII

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2027



BPBD

DAFTAR ISI

DAFTAR ISIi

DAFTAR TABELii

BAB I PENDAHULUAN 1

 1.1. Latar Belakang 1

 1.2. Landasan Hukum 3

 1.3. Maksud dan Tujuan 5

 1.4. Sistematika Penulisan 6

BAB II HASIL EVALUASI RENJA BADAN PENANGGULANGAN 8

 2.1 Evaluasi Capaian Kinerja 8

 2.2 Evaluasi Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM)..... 21

 2.3 Permasalahan dan Isu Strategis 25

 2.4 Telaah Pokok Pikiran DPRD 30

 2.5 Telaah Usulan Masyarakat 31

 2.6 Inovasi Daerah Badan Penanggulangan Bencana Daerah 32

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH 35

 3.1 Tujuan dan Sasaran Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 202735

 3.2 Arah Kebijakan..... 37

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH..... 40

 4.1 Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah..... 40

 4.2 Dukungan Program, Kegiatan, dan Subkegiatan terhadap Kebijakan Tematik Pembangunan Daerah..... 54

BAB V KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN 59

 5.1 Indikator Kinerja Utama (IKU) 59

 5.2 Indikator Kinerja Kunci (IKK) 62

BAB VI PENUTUP 64

 6.1 Kaidah Pelaksanaan 64

 6.2 Pengendalian dan Evaluasi..... 65

LAMPIRAN 66

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s.d. Tahun 2025	12
Tabel 2.2	Evaluasi Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub Urusan Bencana Tahun 2023–2025	22
Tabel 2.3	Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Salatiga.....	24
Tabel 2.4	Identifikasi Masalah Pokok, Masalah, dan Akar Masalah	27
Tabel 2.5	Usulan Program dan Kegiatan dari Usulan Masyarakat	27
Tabel 3.1	Tujuan, Sasaran, Indikator, dan Target Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Salatiga Tahun 2027	36
Tabel 4.1	Rencana Kerja dan Pendanaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Salatiga Tahun 2027	44
Tabel 4.2	Program, Kegiatan, Dan Subkegiatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Salatiga Tahun 2027 Terhadap Kebijakan Tematik Pembangunan Daerah	56
Tabel 5.1	Target Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Salatiga Tahun 2027	61
Tabel 5.2	Target Indikator Kinerja Kunci (IKK) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Salatiga Tahun 2027	62

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Kerja (Renja) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Salatiga Tahun 2027 merupakan dokumen perencanaan tahunan perangkat daerah yang disusun sebagai penjabaran tahun ketiga pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Salatiga Tahun 2025–2029 serta menjadi pedoman penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat pada sub urusan bencana selama Tahun 2027.

Penyusunan Renja juga mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Salatiga Tahun 2027 sebagai penjabaran tahunan dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Salatiga Tahun 2025–2029 sehingga terwujud keterpaduan, sinkronisasi, dan sinergi antara kebijakan pembangunan nasional, pembangunan daerah, dan penyelenggaraan penanggulangan bencana.

Kota Salatiga merupakan salah satu kota di Provinsi Jawa Tengah dengan luas wilayah ±54,98 km² yang terdiri atas 4 kecamatan dan 23 kelurahan. Berdasarkan Data Dataku Kota Salatiga Semester I Tahun 2025, jumlah penduduk Kota Salatiga mencapai 199.350 jiwa. Sebagai kota yang terus berkembang, Kota Salatiga menghadapi berbagai potensi ancaman bencana yang memerlukan penyelenggaraan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, dan berkelanjutan.

Berdasarkan kondisi geografis, geologis, klimatologis, serta perkembangan wilayah tersebut, Kota Salatiga memiliki berbagai potensi ancaman bencana yang memerlukan penyelenggaraan penanggulangan bencana secara terpadu.

Berdasarkan Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI) Tahun 2024 yang diterbitkan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Kota Salatiga memiliki Indeks Risiko Bencana sebesar 76,52 dengan kategori sedang. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa upaya pengurangan risiko bencana perlu terus ditingkatkan melalui penguatan kapasitas pemerintah, masyarakat, dunia usaha, serta seluruh pemangku kepentingan.

Potensi ancaman bencana di Kota Salatiga dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain:

- a. kondisi geografis;
- b. kondisi geologis;

- c. kondisi topografis;
- d. kondisi klimatologis;
- e. kondisi demografis; dan
- f. karakteristik jenis tanah.

Secara geografis, Kota Salatiga berada pada ketinggian 450–825 meter di atas permukaan laut (mdpl) dan memiliki karakteristik morfologi berupa wilayah cekungan yang dikelilingi oleh Gunung Merbabu, Gunung Telomoyo, Gunung Gajah, Gunung Payung, dan Gunung Rong. Berdasarkan Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana Kota Salatiga Tahun 2025–2029, di wilayah Kota Salatiga juga terdapat beberapa struktur patahan geologi, dengan yang paling signifikan adalah Patahan Rawa Pening, serta dipengaruhi oleh keberadaan Patahan Ungaran dan Patahan Semarang. Kondisi tersebut menyebabkan Kota Salatiga memiliki kerawanan terhadap ancaman gempa bumi.

Selain ancaman gempa bumi, Kota Salatiga juga memiliki potensi ancaman bencana lainnya, antara lain:

- a. gempa bumi
- b. tanah longsor
- c. banjir
- d. cuaca ekstrem atau angin kencang
- e. kebakaran
- f. kekeringan
- g. bencana nonalam
- h. bencana sosial

Perkembangan kebijakan penanggulangan bencana di Indonesia telah mengubah paradigma penyelenggaraan penanggulangan bencana dari yang semula berorientasi pada penanganan tanggap darurat menjadi manajemen risiko bencana yang dilaksanakan secara menyeluruh mulai dari tahap prabencana, saat tanggap darurat, hingga pascabencana. Perubahan paradigma tersebut merupakan implementasi amanat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, yang menegaskan bahwa penyelenggaraan penanggulangan bencana merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, dunia usaha, organisasi kemasyarakatan, perguruan tinggi, media, dan pemangku kepentingan lainnya.

Sebagai perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan wajib pelayanan dasar pada sub urusan bencana, BPBD Kota Salatiga mempunyai peran strategis dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana:

- a. menyelenggarakan pencegahan dan mitigasi bencana;
- b. meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat dan aparatur;

- c. melaksanakan penanganan darurat bencana;
- d. melaksanakan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana; serta
- e. mengoordinasikan penyelenggaraan penanggulangan bencana secara terpadu.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, BPBD Kota Salatiga terus mendorong peningkatan kualitas pelayanan melalui penguatan tata kelola, peningkatan kapasitas sumber daya, optimalisasi koordinasi lintas sektor, serta pengembangan inovasi daerah sebagai upaya meningkatkan ketangguhan masyarakat dan daerah terhadap bencana.

Penyusunan Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Salatiga Tahun 2027 didasarkan pada hasil evaluasi pelaksanaan Renja Tahun 2025, capaian Indikator Kinerja Utama (IKU), Indikator Kinerja Kunci (IKK), capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM), serta hasil identifikasi permasalahan dan isu strategis sebagai dasar dalam menetapkan prioritas program, kegiatan, dan subkegiatan Tahun 2027. Renja ini juga disusun sebagai pedoman pelaksanaan program, kegiatan, dan subkegiatan selama satu tahun anggaran serta menjadi dasar dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Salatiga.

Dengan tersusunnya Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Salatiga Tahun 2027 diharapkan penyelenggaraan program, kegiatan, dan subkegiatan dapat dilaksanakan secara terarah, terukur, efektif, efisien, transparan, akuntabel, dan berkelanjutan. Selain itu, Renja ini diharapkan mampu meningkatkan kualitas pelayanan penanggulangan bencana, memperkuat kolaborasi para pemangku kepentingan, mendukung pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM), mendukung pencapaian sasaran pembangunan daerah, serta mewujudkan Kota Salatiga yang tangguh terhadap bencana.

1.2. Landasan Hukum

Peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar penyusunan Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Salatiga Tahun 2027, adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah

Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;

4. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045
5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana.
6. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana.
7. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2008 tentang Peran Serta Lembaga Internasional dan Lembaga Asing Nonpemerintah dalam Penanggulangan Bencana.
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi Kawasan Kendal-Semarang-Salatiga-Demak- Grobogan, Kawasan Purworejo-Wonosobo-Magelang-Temanggung, dan Kawasan Brebes-Tegal-Pemalang;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub-Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Kodifikasi Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
18. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pedoman Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
19. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2016 Nomor 9), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2021 Nomor 14);
20. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 3 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Salatiga Tahun 2023-2043;
21. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Salatiga Tahun 2025-2045;
22. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 7 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Salatiga Tahun 2025-2029;
23. Peraturan Wali Kota Salatiga Nomor 51 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Salatiga Tahun 2025–2029.
24. Peraturan Wali Kota Salatiga Nomor 130 Tahun 2021 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
25. Peraturan Wali Kota Salatiga Nomor 43 Tahun 2024 Tentang Rencana Detail Tata Ruang Kota Salatiga Tahun 2024-2044.
26. Peraturan Wali Kota Salatiga Nomor 12 Tahun 2026 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) / Perubahan RKPD Tahun 2027.

1.3. Maksud dan Tujuan

1.3.1. Maksud

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Salatiga Tahun 2027 dimaksudkan sebagai:

1. Pedoman bagi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Salatiga dalam melaksanakan program, kegiatan, dan subkegiatan selama Tahun 2027.
2. Penjabaran tahunan dari Rencana Strategis (Renstra) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Salatiga Tahun 2025–2029.

3. Acuan dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Salatiga Tahun Anggaran 2027.
4. Instrumen untuk mewujudkan keterpaduan, sinkronisasi, dan sinergi antara kebijakan pembangunan daerah dengan penyelenggaraan urusan penanggulangan bencana.
5. Pedoman dalam pelaksanaan pengendalian, monitoring, dan evaluasi kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat pada sub urusan bencana.

1.3.2. Tujuan

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Salatiga Tahun 2027 bertujuan untuk:

1. Menjabarkan tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program, kegiatan, dan subkegiatan sebagaimana tercantum dalam Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Salatiga Tahun 2025–2029 ke dalam rencana kerja tahunan Tahun 2027.
2. Menjamin keterpaduan dan konsistensi antara Renstra BPBD Kota Salatiga Tahun 2025–2029, RKPD Kota Salatiga Tahun 2027, serta dokumen perencanaan pembangunan daerah lainnya.
3. Menjadi dasar dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Salatiga Tahun Anggaran 2027.
4. Meningkatkan efektivitas, efisiensi, akuntabilitas, dan kualitas penyelenggaraan program serta kegiatan penanggulangan bencana.
5. Mendukung pencapaian tujuan pembangunan daerah melalui penyelenggaraan pelayanan dasar pada sub urusan bencana, pengurangan risiko bencana, peningkatan kesiapsiagaan masyarakat, serta penguatan kapasitas daerah dalam penanggulangan bencana.

1.4. Sistematika Penulisan

Rencana Kerja (Renja) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Salatiga Tahun 2027 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

1. BAB I PENDAHULUAN

Bab ini memuat latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan Renja BPBD Kota Salatiga Tahun 2027.

2. BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

Bab ini memuat hasil evaluasi capaian kinerja, evaluasi Standar Pelayanan Minimal (SPM), rumusan permasalahan dan isu strategis, telaah pokok-pokok pikiran DPRD, serta inovasi bidang urusan.

3. BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

Bab ini memuat tujuan, sasaran, dan arah kebijakan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Salatiga Tahun 2027 yang diselaraskan dengan Renstra BPBD Tahun 2025–2029 dan RKPD Kota Salatiga Tahun 2027.

4. BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Bab ini memuat program, kegiatan, subkegiatan, indikator kinerja, target kinerja, lokasi, pa, sumber pendanaan, prakiraan maju, serta keterkaitan dengan prioritas pemb gu indikatifangunan daerah.

5. BAB V KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Bab ini memuat Indikator Kinerja Utama (IKU), Indikator Kinerja Kunci (IKK), target kinerja penyelenggaraan urusan, serta indikator pelayanan dasar sebagai ukuran keberhasilan pelaksanaan Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Salatiga Tahun 2027.

6. BAB VI PENUTUP

Bab ini memuat kesimpulan serta harapan terhadap pelaksanaan Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Salatiga Tahun 2027 sebagai pedoman dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana dan pencapaian sasaran pembangunan daerah.

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH TAHUN 2025

Evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Salatiga Tahun 2025 dilakukan sebagai bagian dari proses pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017. Evaluasi tersebut bertujuan untuk mengetahui tingkat pencapaian target kinerja program, kegiatan, dan subkegiatan, mengidentifikasi faktor pendukung maupun kendala pelaksanaan, serta menjadi dasar dalam penyusunan Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Salatiga Tahun 2027.

Selain mengevaluasi capaian program dan kegiatan, BAB ini juga memuat capaian kinerja pelayanan perangkat daerah, hasil telaahan terhadap permasalahan dan isu strategis, Pokok-Pokok Pikiran DPRD, telaahan usulan masyarakat, serta inovasi daerah yang menjadi dasar dalam penyusunan program dan kegiatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Salatiga Tahun 2027.

2.1 Evaluasi Capaian Kinerja

Evaluasi capaian kinerja merupakan salah satu tahapan penting dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Salatiga Tahun 2027. Evaluasi ini dilakukan untuk mengetahui tingkat keberhasilan pelaksanaan program, kegiatan, dan subkegiatan Tahun Anggaran 2025 sebagai tahun pertama pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Salatiga Tahun 2025–2029.

Evaluasi capaian kinerja bertujuan untuk:

1. Mengetahui tingkat pencapaian target program, kegiatan, dan subkegiatan yang telah ditetapkan dalam Renja Tahun 2025.
2. Menilai capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Kunci (IKK) sebagai ukuran keberhasilan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat sub urusan bencana.
3. Mengidentifikasi faktor-faktor yang mendukung maupun menghambat pencapaian target kinerja.
4. Mengetahui implikasi capaian kinerja terhadap pencapaian sasaran Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Salatiga Tahun 2025–2029.

5. Menjadi dasar dalam penyusunan kebijakan, program, kegiatan, dan subkegiatan Tahun 2027 yang lebih terarah dan sesuai dengan kebutuhan pelayanan kepada masyarakat.

Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Renja Tahun 2025, secara umum program dan kegiatan telah berjalan sesuai dengan perencanaan serta memberikan kontribusi terhadap pencapaian sasaran perangkat daerah. Pelaksanaan program difokuskan pada dua program utama, yaitu:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, yang mendukung tata kelola pemerintahan melalui penyelenggaraan perencanaan, penganggaran, administrasi keuangan, administrasi kepegawaian, administrasi umum, pengelolaan barang milik daerah, pengadaan barang dan jasa, serta pemeliharaan sarana dan prasarana perangkat daerah.
2. Program Penanggulangan Bencana, yang mendukung pelayanan informasi rawan bencana, pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan, pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana, serta pelayanan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana melalui koordinasi dengan perangkat daerah, instansi vertikal, TNI, Polri, dunia usaha, organisasi kemasyarakatan, relawan, dan masyarakat.

Pada Tahun Anggaran 2025 Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Salatiga memperoleh alokasi anggaran sebesar Rp4.460.701.853,00 dengan realisasi sampai Bulan November sebesar Rp3.210.245.326,00 atau 71,97%. Capaian tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan program dan kegiatan secara umum berjalan sesuai dengan rencana, sedangkan beberapa kegiatan masih memiliki realisasi anggaran yang belum optimal karena dipengaruhi karakteristik penyelenggaraan penanggulangan bencana yang bersifat dinamis dan bergantung pada kondisi kejadian bencana.

Berdasarkan hasil evaluasi, terdapat beberapa kegiatan yang realisasi anggarannya belum mencapai target, antara lain:

1. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan.
2. Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional/Lapangan.
3. Respon Cepat Darurat Bencana.
4. Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana.
5. Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi.
6. Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan.
7. Koordinasi Penanganan Pascabencana.

Rendahnya realisasi pada kegiatan tersebut bukan menunjukkan rendahnya kinerja pelaksanaan, melainkan disebabkan oleh pelaksanaan kegiatan yang bergantung pada kondisi kejadian bencana dan kebutuhan penanganan di

lapangan. Oleh karena itu, evaluasi terhadap kegiatan-kegiatan tersebut lebih menitikberatkan pada kesiapan sumber daya, kecepatan respons, serta efektivitas penanganan dibandingkan dengan besaran realisasi anggaran.

Di sisi lain, beberapa kegiatan menunjukkan capaian yang sangat baik dan memberikan kontribusi positif terhadap peningkatan kualitas pelayanan, antara lain:

1. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya.
2. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD.
3. Sosialisasi, Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana.
4. Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana.

Keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan tersebut didukung oleh beberapa faktor, antara lain:

1. Komitmen Pemerintah Kota Salatiga dalam mendukung penyelenggaraan urusan penanggulangan bencana.
2. Sinergi dan koordinasi yang baik dengan perangkat daerah, instansi vertikal, TNI, Polri, dunia usaha, akademisi, organisasi kemasyarakatan, relawan, dan masyarakat.
3. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan mitigasi, pencegahan, dan kesiapsiagaan bencana.
4. Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan dan pengelolaan administrasi perangkat daerah.

Di samping itu, masih terdapat beberapa faktor yang perlu menjadi perhatian dalam penyusunan Renja Tahun 2027, yaitu:

1. Keterbatasan jumlah dan kompetensi sumber daya manusia di bidang kebencanaan.
2. Belum optimalnya pemenuhan sarana dan prasarana pendukung penyelenggaraan penanggulangan bencana.
3. Meningkatnya kompleksitas ancaman bencana sebagai dampak perubahan iklim dan perkembangan wilayah.
4. Perlunya peningkatan pemanfaatan teknologi informasi dalam mendukung pelayanan kebencanaan.
5. Perlunya penguatan koordinasi dan kolaborasi dengan seluruh pemangku kepentingan.

Hasil evaluasi capaian kinerja tersebut menjadi dasar dalam penyusunan Rencana Kerja Tahun 2027. Program, kegiatan, dan subkegiatan diarahkan untuk meningkatkan kualitas pelayanan informasi rawan bencana, pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan, pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana, rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana, serta penguatan tata kelola pemerintahan. Pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana penunjang tetap

dilaksanakan melalui Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah pada Sekretariat BPBD sebagai pendukung pelaksanaan tugas seluruh bidang sehingga mampu meningkatkan efektivitas penyelenggaraan penanggulangan bencana secara menyeluruh.

Selanjutnya, hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan pencapaian Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Tahun 2025 disajikan pada Tabel 2.1 Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Tahun 2025 dibawah ini :

Tabel 2. 1
Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah
dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s.d. Tahun 2025

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2030	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2025			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2026)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
						Target Renja Perangkat Daerah tahun 2025	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2025	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun Berjalan (2026)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3		4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR										
1.05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT										
1.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase terlaksananya kegiatan pendukung urusan pemerintahan	%	100	100	100.00	100	100.00	100	100	100.00
		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah	Angka	88.81	85.91	87.00	88.14	101.31	88.00	88.54	99.70
		Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Angka	71.00	63.00	0	0	0	65.00	65.00	91.55
1.05.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase cakupan perencanaan, penganggaran dan	%	100	100	100	100	100	100	100	100

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2030	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2025			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2026)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
						Target Renja Perangkat Daerah tahun 2025	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2025	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun Berjalan (2026)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3		4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
		evaluasi kinerja perangkat daerah									
1.05.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	6	6	6	6	100	6	18	300
1.05.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase cakupan administrasi keuangan perangkat daerah	%	100	100	100	100	100	100	100	100
1.05.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/ bulan	13	10	11	12	109.09	11	33	253.85
1.05.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	12	12	12	12	100	6	30	250
1.05.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase cakupan administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	%	100	100	100	100	100	100	100	100
1.05.01.2.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah	Dokumen	1	0	0	0	0	0	0	0

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2030	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2025			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2026)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
						Target Renja Perangkat Daerah tahun 2025	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2025	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun Berjalan (2026)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3		4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
1.05.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase cakupan administrasi kepegawaian perangkat daerah	%	100	100	100	100	100	100	100	100
1.05.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta atribut kelengkapannya	Paket	15	0	2	2	100	0	0	0.00
1.05.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase cakupan kebutuhan administrasi perangkat daerah	%	100	100	100	100	100	100	100	100
1.05.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	1	1	1	1	100	1	3	300
1.05.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan rumah Tangga yang Disediakan	Paket	1	1	1	1	100	1	3	300
1.05.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	3	3	3	3	100	2	8	266.67
1.05.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan penggandaan yang Disediakan	Paket	2	2	3	3	100	2	7	350
1.05.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	12	12	0	0	0.00	0	12	100.00
1.05.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	6	3	2	2	100	3	8	133.33

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2030	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2025			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2026)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
						Target Renja Perangkat Daerah tahun 2025	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2025	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun Berjalan (2026)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3		4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
1.05.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	12	12	5	5	100	12	29	241.67
1.05.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase kecakupan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	%	100	100	100	100	100	100	100	100
1.05.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit	0	0	1	1	100	0	0	0.00
1.05.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	0	4	46	46	100	0	50	0.00
1.05.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	4	3	3	3	100	0	6	150
1.05.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase kecakupan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	%	100	100	100	100	100	100	100	100
1.05.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	12	2	2	2	100	0	4	33.33
1.05.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	12	12	12	100	10	34	283.33

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2030	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2025			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2026)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
						Target Renja Perangkat Daerah tahun 2025	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2025	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun Berjalan (2026)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3		4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
1.05.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase kecakupan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	%	100	100	100	100	100	100	100	100
1.05.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	3	2	2	2	100	2	6	200
1.05.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	9	4	5	4	80	4	12	133.33
1.05.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	22	9	15	9	60	6	24	109.09
1.05.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	Unit	0	1	1	1	100	0	2	0
1.05.03	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	1. Persentase Cakupan Penyebaran Informasi dan Edukasi Rawan Bencana	%	100	100	100	100	100	100	100	100
		2. Persentase Cakupan Layanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap bencana)	%	100	100	100	100	100	100	100	100

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2030	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2025			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2026)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
						Target Renja Perangkat Daerah tahun 2025	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2025	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun Berjalan (2026)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3		4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
		3. Persentase Cakupan Layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	%	100	100	100	100	100	100	100	100
		4. Persentase cakupan penataan sistem pemulihan pascabencana	%	100	100	100	100	100	100	100	100
1.05.03.2.01	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Persentase cakupan pelayanan informasi rawan bencana	%	100	100	100	100	100	100	100	100
1.05.03.2.01.0007	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Ancaman Bencana)	Jumlah Orang yang Mendapatkan Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana) Secara Tatap Muka kepada Penduduk yang Tinggal di Daerah Rawan Bencana Sesuai Jenis Ancaman yang Ada di Kawasan Tempat Tinggalnya	Orang	650	320	320	320	100	150	790	121.54
1.05.03.2.02	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Persentase warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	%	100	100	100	100	100	100	100	100

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2030	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2025			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2026)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
						Target Renja Perangkat Daerah tahun 2025	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2025	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun Berjalan (2026)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	Unit	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
1.05.03.2.02.0015	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota	Jumlah Peralatan Penyelamatan Diri bagi Individu Warga Negara, Keluarga maupun Petugas	Unit	10	15	4	4	100	0	19	190
1.05.03.2.02.0018	Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota	Jumlah Aparatur dan Warga Negara yang Mengikuti Gladi Kesiapsiagaan	Orang	300	250	295	295	100	65	610	203.33
1.05.03.2.02.0019	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	Keluarga	100	200	180	180	100	50	430	430.00
1.05.03.2.02.0020	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana	Jumlah Kawasan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dalam Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana	Kawasan	2	2	1	1	100	3	6	300
1.05.03.2.02.0021	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Personil TRC yang Dikembangkan Kapasitas eknis dan manajerialnya	Orang	100	180	180	180	100	100	460	460
1.05.03.2.02.0022	Penyusunan Rencana Kontijensi Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen rencana Kontijensi yang Dilegalisasi	Dokumen	0	0	1	1	0	1	2	100
1.05.03.2.02.0026	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana dan Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Laporan	12	12	12	12	100	12	36	300
1.05.03.2.02.0028	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Warga Negara dan Aparatur yang Mengikuti Pelatihan Pencegahan dan mitigasi Bencana	Kawasan	2		2	2	100	1	3	150

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2030	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2025			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2026)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
						Target Renja Perangkat Daerah tahun 2025	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2025	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun Berjalan (2026)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3		4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
1.05.03.2.03	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Persentase warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan eakuasi saat masa tanggap darurat bencana	%	100	100	100	100	100	100	100	100
1.05.03.2.03.0002	Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam Berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Kaji Cepat	Dokumen	6	12	12	12	100	6	30	500
1.05.03.2.03.0003	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Bencana	Orang	20	25	10	4	40.00	20	49	245.00
1.05.03.2.03.0009	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Orang	20	10	13	3	23.077	6	19	95.00
1.05.03.2.04	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Persentase lembaga bencana yang terlibat dalam penataan sistem penanggulangan bencana		100	100	100	100	100	100	100	100
	Penguatan Kelembagaan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen tata kelola kelembagaan bencana daerah	Dokumen	0	0	1	1	100.00	0	1	100.00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2030	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2025			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2026)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
						Target Renja Perangkat Daerah tahun 2025	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2025	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun Berjalan (2026)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3		4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
1.05.03.2.04.0005	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	Jumlah Laporan Hasil Binwas Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	Laporan	5		4	1	25.00	1	2	40.00
1.05.03.2.04.0010	Koordinasi penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota Melalui Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana (JITUPASNA) Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P)	Kegiatan	10	15	2	1	50.00	5	21	210

Sumber:

Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Salatiga Tahun 2025–2029; Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Salatiga Tahun 2025; Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Salatiga Tahun 2025; Data SIPD-RI Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Salatiga Tahun 2025 (diolah).

Berdasarkan Tabel 2.1 dapat diketahui bahwa sebagian besar program, kegiatan, dan subkegiatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Salatiga Tahun 2025 telah dilaksanakan sesuai target yang ditetapkan. Meskipun demikian, terdapat beberapa kegiatan yang belum mencapai target baik dari sisi capaian fisik maupun realisasi anggaran yang dipengaruhi oleh karakteristik penyelenggaraan urusan kebencanaan, dinamika kebijakan, serta kondisi kejadian bencana yang tidak dapat diprediksi. Hasil evaluasi tersebut selanjutnya menjadi dasar dalam penyempurnaan perencanaan Tahun 2027.

2.2 Evaluasi Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM)

Standar Pelayanan Minimal (SPM) merupakan ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang menjadi urusan wajib pemerintah daerah dan berhak diperoleh setiap warga negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pada Sub Urusan Bencana, penerapan SPM menjadi salah satu tolok ukur kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Salatiga dalam memberikan pelayanan dasar kepada masyarakat.

Evaluasi capaian SPM dilakukan untuk mengetahui tingkat pencapaian indikator pelayanan dasar bidang kebencanaan selama Tahun 2023 sampai dengan Tahun 2025. Hasil evaluasi ini menjadi dasar dalam mengidentifikasi tingkat keberhasilan penyelenggaraan pelayanan, faktor-faktor yang mendukung maupun menghambat pencapaian target, serta penyusunan strategi peningkatan pelayanan dalam Rencana Kerja (Renja) BPBD Kota Salatiga Tahun 2027.

Selama Tahun 2023 sampai dengan Tahun 2025, BPBD Kota Salatiga telah melaksanakan pelayanan dasar sesuai Standar Pelayanan Minimal melalui pelayanan informasi rawan bencana, pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana, serta pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana. Pelaksanaan pelayanan tersebut didukung dengan penyusunan dan pembaruan dokumen kebencanaan, peningkatan kapasitas aparatur, relawan, dan masyarakat, serta penguatan koordinasi dan kolaborasi dengan perangkat daerah, instansi vertikal, TNI, Polri, BPBD Provinsi Jawa Tengah, dunia usaha, perguruan tinggi, organisasi kemasyarakatan, media, dan unsur masyarakat sebagai bagian dari pendekatan pentahelix.

Selanjutnya, hasil evaluasi capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Salatiga Tahun 2023–2025 disajikan pada Tabel 2.2.

Tabel 2.2 Evaluasi Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub Urusan Bencana Tahun 2023–2025

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator	2023	2024	2025	Analisis Singkat	Tindak Lanjut
1	Pelayanan Informasi Rawan Bencana	Persentase warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	100%	100%	100%	Pelayanan informasi rawan bencana telah dilaksanakan sesuai ketentuan SPM melalui sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi (KIE), serta penyebaran informasi kebencanaan kepada masyarakat.	Meningkatkan jangkauan pelayanan informasi, pemanfaatan media digital, dan sistem informasi kebencanaan
2	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan	Persentase warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan	100%	100%	100%	Pelayanan dilaksanakan melalui pelatihan, simulasi kebencanaan, pembentukan dan pembinaan Kelurahan Tangguh Bencana, serta peningkatan kapasitas masyarakat dan relawan.	Memperluas sasaran pelatihan, meningkatkan kapasitas SDM dan penguatan kolaborasi pentahelix.
3	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Persentase warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	100%	100%	100%	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi dilaksanakan sesuai kebutuhan kejadian bencana melalui koordinasi lintas sektor dan penguatan Tim Reaksi Cepat (TRC).	Penguatan peralatan, logistik kebencanaan, kapasitas personel dan sistem komando penanganan darurat.

Sumber:
Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Salatiga Tahun 2025–2029; Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2025; Data BNPB; Data BPBD Kota Salatiga Tahun 2025.

Berdasarkan Tabel 2.2 dapat diketahui bahwa sebagian besar indikator kinerja pelayanan menunjukkan kecenderungan meningkat dan sesuai dengan target Renstra. Adapun indikator yang belum mencapai target dipengaruhi oleh keterbatasan anggaran, kapasitas penyelenggaraan kegiatan, jumlah sasaran pelayanan, serta karakteristik penyelenggaraan penanggulangan bencana yang sangat dipengaruhi oleh kondisi di lapangan. Hasil evaluasi tersebut menjadi dasar dalam penetapan target kinerja pelayanan Tahun 2027.

Pencapaian kinerja pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Salatiga merupakan hasil pelaksanaan program, kegiatan, dan subkegiatan yang mengacu pada Rencana Strategis (Renstra) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Salatiga Tahun 2025–2029. Evaluasi capaian kinerja dilakukan sebagai dasar dalam penyusunan target dan peningkatan kualitas pelayanan pada Tahun 2027. Selanjutnya, perkembangan pencapaian kinerja pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Salatiga disajikan pada Tabel 2.3.

Tabel 2. 3 Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Salatiga

No.	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Indeks Ketahanan Daerah (IKD) Terhadap Bencana	-	-	0,66	0,69	0,72	0,75	0,5	-	0,72	0,75	IKD Kota Salatiga Tahun 2025 belum di rilis BNPB
2	Indeks Risiko Bencana	-	-	74,54-73,82	73,71-72,69	72,89-71,67	72,06-70,45	76,52	-	72,89	72,06	IRB Kota Salatiga tahun 2025 belum di rilis BNPB
3	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	- SPM Sub Urusan Bencana	✓	1,244	1,304	1,364	1,424	1,184		1,364	1,424	Realisasi capaian belum memenuhi target Renstra karena pelaksanaan kegiatan disesuaikan dengan prioritas daerah, jumlah sasaran yang dapat dilayani pada tahun berjalan. Meskipun demikian, penyebaran informasi rawan bencana tetap dilaksanakan melalui kegiatan sosialisasi, komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE).
4	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	SPM Sub Urusan Bencana	✓	735	770	805	840	700		805	840	Realisasi capaian belum memenuhi target Renstra karena pelaksanaan kegiatan disesuaikan dengan prioritas penanganan kebencanaan, dan kapasitas penyelenggaraan kegiatan pada tahun berjalan. Meskipun demikian, upaya peningkatan kapasitas masyarakat tetap dilaksanakan melalui pelatihan, simulasi, dan kegiatan kesiapsiagaan.
5	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	- SPM Sub Urusan Bencana	✓	8,684	8,511	8,341	8,175	8,861	2,742	8,341	8,175	Realisasi dipengaruhi oleh jumlah sasaran pelayanan dan kondisi kejadian bencana pada tahun berjalan.
6.	Kelurahan Tangguh Bencana	-	-	21,00	26,00	-	-	86,96	-	-	-	1. Realisasi melebihi target, dikarenakan adanya perubahan formulasi perhitungan 2. Dalam Renstra BPBD 2025-2029 sudah tidak menjadi indikator Kinerja

Sumber: Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Salatiga Tahun 2025–2029.

Berdasarkan Tabel 2.3 dapat diketahui bahwa secara umum kinerja pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Salatiga menunjukkan capaian yang baik dan mendukung pencapaian target Renstra Perangkat Daerah. Indikator pelayanan dasar pada Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub Urusan Bencana terus diupayakan agar memenuhi target melalui peningkatan kualitas layanan informasi rawan bencana, pencegahan dan kesiapsiagaan, serta penyelamatan dan evakuasi korban bencana.

Beberapa indikator pelayanan belum sepenuhnya mencapai target Renstra karena dipengaruhi oleh keterbatasan kapasitas penyelenggaraan kegiatan, jumlah sasaran pelayanan, serta karakteristik penyelenggaraan penanggulangan bencana yang sangat dipengaruhi oleh kondisi kejadian bencana pada tahun berjalan. Di sisi lain, indikator Indeks Risiko Bencana (IRB) dan Indeks Ketahanan Daerah (IKD) masih menggunakan data terakhir yang tersedia karena hasil pengukuran Tahun 2025 belum dirilis oleh BNPB.

Hasil evaluasi capaian kinerja pelayanan tersebut menjadi salah satu dasar dalam penyusunan target kinerja Tahun 2027 sehingga program, kegiatan, dan subkegiatan yang direncanakan mampu mendukung peningkatan kualitas pelayanan kebencanaan secara efektif, efisien, terukur, dan berkelanjutan sesuai dengan arah kebijakan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Salatiga Tahun 2025–2029.

2.3 Permasalahan dan Isu Strategis

Permasalahan dan isu strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Salatiga merupakan hasil identifikasi terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah berdasarkan evaluasi pelaksanaan Renja Tahun 2025, capaian kinerja perangkat daerah, evaluasi Standar Pelayanan Minimal (SPM), serta telaah terhadap dokumen perencanaan daerah dan perkembangan kondisi kebencanaan di Kota Salatiga. Hasil identifikasi tersebut menjadi dasar dalam penyusunan program, kegiatan, dan subkegiatan Tahun 2027.

Dalam pelaksanaan urusan pemerintahan bidang ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat sub urusan bencana, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Salatiga telah menunjukkan capaian kinerja yang cukup baik. Namun demikian, dinamika perkembangan wilayah, perubahan iklim, meningkatnya kompleksitas ancaman bencana, serta tuntutan masyarakat terhadap pelayanan yang cepat, tepat, dan berkualitas menjadi tantangan yang harus diantisipasi melalui penguatan kapasitas kelembagaan,

peningkatan kualitas pelayanan, serta optimalisasi kolaborasi dengan seluruh pemangku kepentingan.

Kondisi geografis dan karakteristik wilayah Kota Salatiga menyebabkan daerah ini memiliki potensi terhadap berbagai jenis bencana, baik bencana alam maupun bencana nonalam. Potensi bencana tersebut meliputi banjir, tanah longsor, cuaca ekstrem, gempa bumi, kekeringan, kebakaran, serta bencana nonalam seperti wabah penyakit atau kondisi kedaruratan lainnya. Beragamnya potensi ancaman tersebut menjadi dasar perlunya penyelenggaraan penanggulangan bencana yang terencana, terpadu, dan berkelanjutan melalui penguatan kapasitas pemerintah daerah, masyarakat, dunia usaha, akademisi, media, dan relawan dalam upaya pengurangan risiko bencana.

Berdasarkan hasil evaluasi tersebut, permasalahan yang dihadapi dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana dapat dikelompokkan menjadi permasalahan internal dan permasalahan eksternal sebagai berikut:

A. Permasalahan Internal

Permasalahan internal merupakan permasalahan yang berasal dari kondisi internal organisasi dan mempengaruhi efektivitas penyelenggaraan tugas dan fungsi BPBD Kota Salatiga, antara lain:

1. Keterbatasan jumlah aparatur yang memiliki kompetensi teknis di bidang kebencanaan.
2. Belum optimalnya pemenuhan sarana dan prasarana pendukung penyelenggaraan penanggulangan bencana.
3. Perlunya peningkatan kapasitas aparatur, relawan, dan Tim Reaksi Cepat (TRC) melalui pendidikan dan pelatihan secara berkelanjutan.
4. Belum optimalnya pemanfaatan teknologi informasi dalam mendukung pelayanan kebencanaan.
5. Perlunya penguatan tata kelola pemerintahan, pengelolaan data dan informasi kebencanaan, serta koordinasi internal perangkat daerah.

B. Permasalahan Eksternal

Permasalahan eksternal merupakan faktor yang berasal dari lingkungan strategis dan mempengaruhi penyelenggaraan penanggulangan bencana, antara lain:

1. Meningkatnya potensi bencana hidrometeorologi sebagai dampak perubahan iklim.

2. Masih rendahnya tingkat kesiapsiagaan sebagian masyarakat dalam menghadapi potensi bencana.
3. Belum optimalnya partisipasi masyarakat dan dunia usaha dalam upaya pengurangan risiko bencana..
4. Perlunya penguatan sinergi dan kolaborasi antar pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana.
5. Meningkatnya kebutuhan pelayanan masyarakat yang menuntut respon cepat, tepat, dan terkoordinasi.

Permasalahan tersebut saling berkaitan dan mempengaruhi pencapaian target kinerja perangkat daerah. Oleh karena itu, diperlukan langkah-langkah strategis yang terencana dan berkelanjutan untuk meningkatkan kualitas pelayanan kebencanaan, memperkuat kapasitas kelembagaan, serta mengoptimalkan peran seluruh pemangku kepentingan dalam upaya pengurangan risiko bencana.

Selanjutnya, identifikasi permasalahan yang dihadapi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Salatiga disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.4 Identifikasi Masalah Pokok, Masalah, dan Akar Masalah

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
Belum optimalnya pengurangan risiko bencana di Kota Salatiga	1. Masih Rendahnya Tingkat kesiapsiagaan Masyarakat lokal dan komunitas lokal.	1. Pelaksanaan sosialisasi, komunikasi,informasi dan edukasi (KIE) kebencanaan belum menjangkau seluruh Masyarakat. 2. Peran relawan yang dibentuk di Kelurahan belum optimal dalam memberikan edukasi dan pendampingan kepada masyarakat di wilayahnya
	2. Masih Lemahnya kelembagaan dan kemampuan manajemen penanggulangan bencana.	1. Belum memiliki dokumen kebencanaan yang lengkap 2. Belum memiliki sarana prasarana penanggulangan bencana tertentu
	3. Belum meratanya sarana dan prasarana pendukung pengurangan risiko bencana	1. Jalur evakuasi dan titik kumpul belum disosialisasikan di daerah rawan bencana 2. Minimnya EWS, sirine, sensor, CCTV yang terpasang di daerah rawan bencana
	4. Belum optimalnya integrasi pengurangan risiko bencana ke dalam dokumen perencanaan pembangunan dan tata ruang	1. Belum diwajibkannya pengurangan risiko bencana dalam penyusunan dokumen perencanaan, sehingga koordinasi lintas Perangkat Daerah teknis belum bisa berjalan secara efektif

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
	5. Masih rendahnya peran pentahelix dalam pengurangan risiko bencana	1. Belum optimalnya FPRB yang telah dibentuk dalam mengakomodir peran dari multi sektor dan berperan aktif dalam pengurangan risiko bencana 2. Belum optimalnya <i>networking</i> kebencanaan 3. Belum optimalnya keterlibatan dunia usaha dalam penyelenggaraan pengurangan risiko bencana.
	6. Masih terbatasnya Sumber Daya Manusia yang mendukung pengurangan risiko bencana	1. Masih rendahnya kapasitas dan kompetensi Sumber Daya Manusia yang berhubungan dengan mitigasi, kesiapsiagaan , tanggap darurat, rehabilitasi dan rekonstruksi masih perlu ditingkatkan 2. Jumlah personel yang memiliki kompetensi teknis kebencanaan belum memadai dibandingkan kebutuhan pelayanan.

Sumber:
Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Salatiga Tahun 2025–2029.

Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Salatiga Tahun 2025.

Berdasarkan hasil identifikasi sebagaimana disajikan pada Tabel 2.5, dapat diketahui bahwa permasalahan utama penyelenggaraan penanggulangan bencana tidak hanya dipengaruhi oleh faktor internal organisasi, tetapi juga oleh kondisi eksternal yang berkembang di masyarakat. Oleh karena itu, penyusunan program dan kegiatan Tahun 2027 diarahkan untuk menjawab akar permasalahan tersebut melalui penguatan kapasitas kelembagaan, peningkatan kualitas pelayanan dasar sesuai Standar Pelayanan Minimal (SPM), peningkatan kompetensi sumber daya manusia, pemenuhan sarana dan prasarana pendukung, serta penguatan kolaborasi dengan seluruh pemangku kepentingan.

Selain itu, berbagai akar permasalahan tersebut menjadi dasar dalam pengembangan inovasi daerah untuk memperkuat kolaborasi pentahelix melalui Perusahaan Tangguh Bencana (PERTANA).

Permasalahan dan akar permasalahan tersebut selanjutnya menjadi dasar dalam perumusan isu strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Salatiga Tahun 2027 sebagaimana diuraikan pada Subbab 2.3.1.

2.3.1 Isu Strategis

Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Renja Tahun 2025, capaian kinerja perangkat daerah, evaluasi pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM), identifikasi permasalahan dan akar permasalahan, serta memperhatikan arah kebijakan pembangunan daerah, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Salatiga menetapkan isu strategis sebagai dasar dalam penyusunan

Rencana Kerja Tahun 2027. Isu strategis tersebut disusun untuk menjawab berbagai tantangan penyelenggaraan penanggulangan bencana sekaligus mendukung pencapaian sasaran pembangunan daerah melalui peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Adapun isu strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Salatiga Tahun 2027 adalah sebagai berikut.:

1. Meningkatkan kapasitas daerah dalam pengurangan risiko bencana.

Peningkatan kapasitas daerah diarahkan melalui penyusunan dan pemutakhiran dokumen kebencanaan, penguatan kelembagaan, peningkatan koordinasi lintas sektor, serta pengintegrasian pengurangan risiko bencana ke dalam perencanaan pembangunan daerah sebagai upaya mewujudkan daerah yang tangguh terhadap bencana.

2. Meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat terhadap ancaman bencana.

Peningkatan kesiapsiagaan masyarakat dilakukan melalui penyelenggaraan komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE), pelatihan mitigasi bencana, gladi kesiapsiagaan, pembentukan dan pembinaan Kelurahan Tangguh Bencana, pemberdayaan keluarga tanggap bencana, serta peningkatan kapasitas relawan dan Tim Reaksi Cepat (TRC).

3. Meningkatkan kualitas pelayanan dasar dan respons penanganan darurat bencana sesuai Standar Pelayanan Minimal (SPM).

Peningkatan kualitas pelayanan dilakukan melalui optimalisasi pelayanan informasi rawan bencana, pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan, pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana, penyediaan logistik kebencanaan, penguatan respon cepat darurat bencana, serta penguatan sistem komando penanganan darurat sesuai ketentuan Standar Pelayanan Minimal.

4. Meningkatkan kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia kebencanaan.

Peningkatan kapasitas kelembagaan diarahkan melalui pengembangan kompetensi aparatur, peningkatan kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC), relawan kebencanaan, penguatan koordinasi, serta penerapan tata kelola organisasi yang profesional, responsif, transparan, dan akuntabel.

5. Meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana pendukung penyelenggaraan penanggulangan bencana.

Pemenuhan sarana dan prasarana dilaksanakan melalui Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah pada Sekretariat BPBD sebagai pendukung pelaksanaan tugas seluruh bidang, sehingga mampu meningkatkan efektivitas

pelayanan, mempercepat respons penanganan bencana, serta mendukung kelancaran pelaksanaan program dan kegiatan perangkat daerah.

6. Memperkuat sinergi dan kolaborasi pentahelix dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana.

Sinergi dilaksanakan melalui peningkatan koordinasi dan kolaborasi dengan perangkat daerah, instansi vertikal, TNI, Polri, BPBD Provinsi Jawa Tengah, dunia usaha, perguruan tinggi, organisasi kemasyarakatan, relawan, media, serta masyarakat guna mendukung penyelenggaraan penanggulangan bencana yang terpadu, efektif, dan berkelanjutan.

7. Meningkatkan pemanfaatan teknologi informasi dan pengembangan inovasi daerah dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana.

Pemanfaatan teknologi informasi dan inovasi daerah diarahkan untuk meningkatkan kualitas pelayanan kebencanaan, mempercepat penyebaran informasi, mendukung pengambilan keputusan, memperkuat koordinasi antar pemangku kepentingan, serta meningkatkan partisipasi masyarakat dalam upaya pengurangan risiko bencana.

Berdasarkan isu strategis tersebut, arah kebijakan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Salatiga Tahun 2027 difokuskan pada peningkatan kualitas pelayanan dasar kebencanaan, penguatan kapasitas kelembagaan, peningkatan kesiapsiagaan masyarakat, pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM), pemenuhan sarana dan prasarana pendukung, penguatan kolaborasi pentahelix, serta pengembangan inovasi daerah dalam rangka mewujudkan Kota Salatiga yang tangguh terhadap bencana. Selanjutnya, isu strategis tersebut menjadi dasar dalam penyusunan tujuan, sasaran, program, kegiatan, dan subkegiatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Salatiga Tahun 2027.

2.4 Telaah Pokok Pikiran DPRD

Telaah terhadap Pokok-Pokok Pikiran (Pokir) DPRD dilakukan sebagai bagian dari proses penyusunan Rencana Kerja (Renja) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Salatiga Tahun 2027. Pokok-Pokok Pikiran DPRD merupakan salah satu bahan masukan dalam penyusunan program, kegiatan, dan subkegiatan perangkat daerah yang berasal dari hasil penjangkaran aspirasi masyarakat melalui mekanisme yang dilaksanakan oleh DPRD.

Dalam penyusunan Renja Tahun 2027 telah dilakukan penelaahan terhadap Pokok-Pokok Pikiran DPRD Kota Salatiga dengan memperhatikan kesesuaian terhadap tugas dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana

Daerah, arah kebijakan pembangunan daerah, tujuan dan sasaran Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Salatiga Tahun 2025–2029, serta kemampuan keuangan daerah.

Berdasarkan hasil telaahan, sampai dengan penyusunan Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Salatiga Tahun 2027 tidak terdapat Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang secara langsung menjadi kewenangan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Salatiga untuk diakomodasi ke dalam program, kegiatan, maupun subkegiatan Tahun 2027.

Dengan demikian, penyusunan program, kegiatan, dan subkegiatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Salatiga Tahun 2027 tetap mengacu pada hasil evaluasi pelaksanaan Renja Tahun 2025, tujuan dan sasaran Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Salatiga Tahun 2025–2029, prioritas pembangunan daerah, Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub Urusan Bencana, serta isu strategis penyelenggaraan penanggulangan bencana di Kota Salatiga.

2.5 Telaah Usulan Masyarakat

Telaahan usulan masyarakat merupakan salah satu tahapan dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah yang bertujuan untuk mengidentifikasi usulan masyarakat sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah. Telaahan dilakukan terhadap usulan yang berasal dari hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang), forum perangkat daerah, maupun sumber usulan lainnya yang berkaitan dengan urusan penanggulangan bencana.

Berdasarkan hasil telaahan terhadap usulan masyarakat dalam penyusunan Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Salatiga Tahun 2027, tidak terdapat usulan program, kegiatan, maupun subkegiatan yang menjadi kewenangan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Salatiga untuk diakomodasi dalam Renja Tahun 2027.

Selanjutnya hasil telaahan usulan masyarakat disajikan pada Tabel 2.5 berikut.

Tabel 2.5 Usulan Program dan Kegiatan dari Usulan Masyarakat

No.	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6
	Nihil				Tidak terdapat usulan program dan kegiatan dari masyarakat maupun pemangku kepentingan yang diakomodasi dalam penyusunan Renja BPBD Kota Salatiga Tahun 2027

Sumber: Hasil Telaahan Usulan Masyarakat dalam Penyusunan Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Salatiga Tahun 2027.

2.6 Inovasi Daerah Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Dalam rangka meningkatkan kualitas penyelenggaraan penanggulangan bencana serta memperkuat pelayanan kepada masyarakat, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Salatiga mengembangkan inovasi Perusahaan Tangguh Bencana (PERTANA) sebagai upaya memperkuat kolaborasi antara pemerintah daerah, dunia usaha, dan pemangku kepentingan lainnya dalam mendukung pengurangan risiko bencana.

A. Latar Belakang

Pengembangan inovasi PERTANA dilatarbelakangi oleh kondisi Kota Salatiga yang masih memiliki tingkat risiko bencana kategori sedang berdasarkan Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI) Tahun 2024. Kondisi tersebut menunjukkan perlunya peningkatan kapasitas daerah melalui keterlibatan seluruh unsur pentahelix, termasuk dunia usaha, dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana.

Selain itu, keterlibatan dunia usaha dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana masih perlu ditingkatkan agar kapasitas daerah semakin kuat dalam menghadapi potensi bencana.

B. Tujuan

Inovasi PERTANA bertujuan untuk:

- 1. meningkatkan partisipasi dunia usaha dalam penanggulangan bencana;
- 2. meningkatkan kapasitas perusahaan dalam menghadapi potensi bencana;
- 3. memperkuat sinergi antara BPBD, dunia usaha, dan pemangku kepentingan lainnya;
- 4. mendukung pengurangan risiko bencana; dan

5. meningkatkan ketahanan daerah melalui kolaborasi pentahelix.

C. Bentuk Inovasi

PERTANA dilaksanakan melalui beberapa tahapan, yaitu:

1. pendataan perusahaan calon peserta;
2. sosialisasi program;
3. komitmen keikutsertaan perusahaan;
4. pembentukan Tim Tangguh Bencana Perusahaan;
5. pelatihan dan pendampingan;
6. pemenuhan standar kesiapsiagaan;
7. penetapan Perusahaan Tangguh Bencana;
8. monitoring dan evaluasi.

Melalui tahapan tersebut diharapkan setiap perusahaan mampu mengidentifikasi potensi risiko bencana di lingkungan kerjanya, menyusun langkah-langkah kesiapsiagaan, membentuk Tim Tangguh Bencana Perusahaan, meningkatkan kapasitas sumber daya manusia, serta melaksanakan upaya penanganan keadaan darurat secara mandiri sesuai dengan karakteristik risiko yang dihadapi. Selain itu, pelaksanaan inovasi PERTANA diharapkan dapat memperkuat sinergi antara pemerintah daerah, dunia usaha, masyarakat, akademisi, media, dan relawan dalam mendukung upaya pengurangan risiko bencana serta meningkatkan ketahanan daerah terhadap berbagai potensi ancaman bencana.

D. Manfaat

Pelaksanaan inovasi Perusahaan Tangguh Bencana (PERTANA) diharapkan memberikan manfaat bagi berbagai pihak sebagai berikut.

1. Bagi Pemerintah Daerah
 - a. meningkatkan ketahanan daerah terhadap risiko bencana;
 - b. memperkuat kolaborasi lintas sektor dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana; dan
 - c. mendukung pencapaian sasaran pembangunan daerah yang berkelanjutan.
2. Bagi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD)
 - a. meningkatkan efektivitas penyelenggaraan pelayanan kebencanaan;
 - b. memperkuat jejaring dan kemitraan dengan dunia usaha serta pemangku kepentingan lainnya;
 - c. mendukung pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub Urusan Bencana melalui peningkatan kapasitas masyarakat dan dunia usaha; dan
 - d. memperkuat koordinasi dalam upaya pengurangan risiko bencana, kesiapsiagaan, serta penanganan keadaan darurat.

3. Bagi Dunia Usaha

- a. meningkatkan kapasitas dan kesiapsiagaan perusahaan dalam menghadapi potensi bencana;
- b. mengurangi risiko operasional dan kerugian akibat bencana;
- c. meningkatkan keselamatan pekerja dan keberlangsungan operasional perusahaan; dan
- d. mendukung pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan (Corporate Social Responsibility/CSR) di bidang kebencanaan.

4. Bagi Masyarakat

- a. meningkatkan literasi dan kesadaran masyarakat terhadap risiko bencana;
- b. memperkuat kesiapsiagaan masyarakat di lingkungan sekitar perusahaan; dan
- c. meningkatkan partisipasi masyarakat dalam upaya pengurangan risiko bencana melalui kolaborasi pentahelix.

E. Target Pengembangan

Target yang ingin dicapai meliputi:

- a. bertambahnya jumlah perusahaan peserta PERTANA;
- b. terbentuknya Tim Tangguh Bencana Perusahaan;
- c. meningkatnya kapasitas SDM perusahaan;
- d. terbentuknya Forum Perusahaan Tangguh Bencana;
- e. meningkatnya kolaborasi pentahelix; dan
- f. terwujudnya lingkungan usaha yang lebih tangguh terhadap bencana.

F. Rencana Pengembangan

Ke depan, inovasi PERTANA akan dikembangkan melalui perluasan jumlah perusahaan peserta, penguatan kapasitas sumber daya manusia, pembentukan Forum Perusahaan Tangguh Bencana, penguatan kolaborasi lintas sektor, serta pengembangan inovasi agar dapat dikembangkan secara berkelanjutan sesuai kebutuhan dan karakteristik Kota Salatiga.

Dengan adanya inovasi Perusahaan Tangguh Bencana (PERTANA) diharapkan terbangun budaya sadar bencana pada lingkungan dunia usaha, meningkatnya kolaborasi pentahelix dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana, serta semakin kuatnya ketahanan daerah terhadap berbagai potensi ancaman bencana. Inovasi ini juga menjadi salah satu bentuk dukungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Salatiga terhadap pencapaian sasaran pembangunan daerah, pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM), dan peningkatan kualitas pelayanan publik di bidang kebencanaan.

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

Bab ini memuat tujuan, sasaran, dan arah kebijakan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Salatiga Tahun 2027 sebagai penjabaran tahun ketiga pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Salatiga Tahun 2025–2029. Perumusan tujuan, sasaran, dan arah kebijakan dilakukan dengan mengacu pada Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Salatiga Tahun 2025–2029, memperhatikan hasil evaluasi pelaksanaan Renja Tahun 2025, isu strategis perangkat daerah, serta arah kebijakan pembangunan nasional dan daerah di bidang penanggulangan bencana.

Tujuan, sasaran, dan arah kebijakan tersebut menjadi pedoman dalam penyusunan program, kegiatan, dan subkegiatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Salatiga Tahun 2027 sehingga pelaksanaannya selaras dengan prioritas pembangunan daerah, mendukung pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub Urusan Bencana, serta berkontribusi terhadap pencapaian sasaran pembangunan daerah.

3.1 Tujuan dan Sasaran Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2027

Rencana Kerja (Renja) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Salatiga Tahun 2027 merupakan penjabaran tahunan dari Rencana Strategis (Renstra) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Salatiga Tahun 2025–2029. Tujuan dan sasaran Renja Tahun 2027 disusun dengan mengacu pada tujuan dan sasaran Renstra serta diselaraskan dengan arah kebijakan pembangunan daerah sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kota Salatiga Tahun 2025–2029 dan RKPD Kota Salatiga Tahun 2027.

Dalam mendukung pencapaian pembangunan daerah, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Salatiga berkontribusi terhadap Misi Ke-4 RPJMD Kota Salatiga Tahun 2025–2029, yaitu:

"Mewujudkan pengelolaan lingkungan hidup yang berorientasi pemanfaatan tata ruang yang inklusif dan berkualitas melalui peningkatan kesadaran masyarakat, pemanfaatan teknologi, dan penegakan hukum."

Untuk mendukung pencapaian misi tersebut, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Salatiga menetapkan tujuan dan sasaran sebagai berikut.

Tujuan

Menurunnya risiko bencana melalui ketahanan daerah terhadap perubahan iklim.

Sasaran

- 1. Meningkatnya pemahaman dan kesadaran masyarakat terhadap risiko bencana.
- 2. Meningkatnya kapasitas daerah dalam penanggulangan bencana.

Tujuan dan sasaran tersebut diukur melalui indikator kinerja beserta target Tahun 2027 sebagaimana disajikan pada Tabel 3.1.

Tabel 3.1 Tujuan, Sasaran, Indikator, dan Target Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Salatiga Tahun 2027

Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target	Satuan
Menurunnya risiko bencana melalui ketahanan daerah terhadap perubahan iklim	-	Indeks Risiko Bencana (IRB)	72,89–71,67	Angka
	-	Indeks Ketahanan Daerah (IKD)	0,72	Angka
	Meningkatnya pemahaman dan kesadaran masyarakat terhadap risiko bencana	Jumlah warga negara yang mendapatkan sosialisasi, komunikasi, informasi, edukasi (KIE), simulasi, dan informasi rawan bencana	1.364	Orang
	Meningkatnya kapasitas daerah dalam penanggulangan bencana	Pengkajian risiko bencana dan perencanaan secara terpadu	1	Dokumen
		Peningkatan efektivitas pencegahan dan mitigasi bencana	100	%
		Jumlah korban yang berhasil dievakuasi dan diselamatkan	8.341	Orang
		Pengembangan sistem dasar dan pemulihan pascabencana	100	%

Sumber: Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Salatiga Tahun 2025–2029.

Berdasarkan Tabel 3.1, tujuan dan sasaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Salatiga Tahun 2027 diarahkan pada penurunan risiko bencana melalui peningkatan ketahanan daerah terhadap perubahan iklim, peningkatan pemahaman dan kesadaran masyarakat terhadap risiko bencana, serta peningkatan kapasitas daerah dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana. Target kinerja tersebut menjadi dasar dalam penyusunan program, kegiatan, dan subkegiatan Tahun 2027 serta menjadi acuan dalam pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pengukuran kinerja perangkat daerah.

3.2 Arah Kebijakan

Arah kebijakan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Salatiga Tahun 2027 merupakan pedoman operasional dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat pada sub urusan bencana. Arah kebijakan disusun sebagai penjabaran dari tujuan dan sasaran Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Salatiga Tahun 2025–2029 dengan memperhatikan kebijakan nasional, kebijakan pembangunan daerah, hasil evaluasi pelaksanaan Renja Tahun 2025, serta isu strategis yang berkembang.

Arah Kebijakan Nasional

Penyusunan Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Salatiga Tahun 2027 mengacu pada arah pembangunan nasional sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025–2029 dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2027. Kebijakan nasional di bidang penanggulangan bencana diarahkan pada penguatan pengurangan risiko bencana, peningkatan kapasitas pemerintah daerah dan masyarakat, penguatan sistem penanganan darurat, peningkatan kualitas pelayanan dasar bidang kebencanaan, serta peningkatan ketangguhan daerah melalui kolaborasi seluruh pemangku kepentingan.

Penyelenggaraan penanggulangan bencana juga mengacu pada Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana yang menegaskan bahwa penanggulangan bencana merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, dunia usaha, perguruan tinggi, media, organisasi kemasyarakatan, dan pemangku kepentingan lainnya melalui pendekatan pentahelix.

Arah Kebijakan Daerah

Arah kebijakan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Salatiga Tahun 2027 diselaraskan dengan RPJMD Kota Salatiga Tahun 2025–2029 dan RKPD Kota Salatiga Tahun 2027, khususnya dalam mendukung Misi Ke-4, yaitu mewujudkan pengelolaan lingkungan hidup yang berorientasi pada pemanfaatan tata ruang yang inklusif dan berkualitas melalui peningkatan kesadaran masyarakat, pemanfaatan teknologi, dan penegakan hukum.

Penyelarasan tersebut diwujudkan melalui peningkatan kapasitas daerah dalam pengurangan risiko bencana, peningkatan kesiapsiagaan masyarakat, pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM), penguatan tata kelola penyelenggaraan penanggulangan bencana, serta peningkatan kolaborasi lintas sektor dalam mewujudkan Kota Salatiga yang tangguh terhadap bencana.

Arah Kebijakan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Salatiga

Dengan memperhatikan hasil evaluasi pelaksanaan Renja Tahun 2025, permasalahan, isu strategis, serta tujuan dan sasaran Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Salatiga Tahun 2025–2029, arah kebijakan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Salatiga Tahun 2027 difokuskan pada:

1. Meningkatkan upaya pengurangan risiko bencana melalui penyusunan dan pemutakhiran dokumen kebencanaan, penguatan mitigasi struktural dan nonstruktural, serta pengintegrasian pengurangan risiko bencana ke dalam pembangunan daerah.
2. Meningkatkan kapasitas masyarakat dan kelembagaan kebencanaan melalui komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE), pelatihan, simulasi kebencanaan, pembentukan dan pembinaan Kelurahan Tangguh Bencana, Satuan Pendidikan Aman Bencana (SPAB), serta peningkatan kapasitas relawan dan Tim Reaksi Cepat (TRC).
3. Meningkatkan kualitas pelayanan dasar sesuai Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub Urusan Bencana melalui pelayanan informasi rawan bencana, pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan, pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana, serta penguatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana.
4. Meningkatkan kapasitas penanganan keadaan darurat melalui penguatan sistem komando penanganan darurat, peningkatan kesiapan personel, penyediaan logistik dan peralatan kebencanaan, serta optimalisasi koordinasi lintas sektor.
5. Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan penunjang perangkat daerah melalui penguatan perencanaan, penganggaran, pengelolaan keuangan, administrasi umum, administrasi kepegawaian, pengelolaan barang milik daerah, pemanfaatan teknologi informasi, serta penyediaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendukung penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah.
6. Memperkuat sinergi dan kolaborasi pentahelix dengan perangkat daerah, instansi vertikal, TNI, Polri, BPBD Provinsi Jawa Tengah, dunia usaha, perguruan tinggi, organisasi kemasyarakatan, media, relawan, dan masyarakat dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana.
7. Mengembangkan inovasi daerah melalui Perusahaan Tangguh Bencana (PERTANA) sebagai upaya meningkatkan partisipasi dunia usaha dalam

pengurangan risiko bencana, peningkatan kesiapsiagaan, serta penguatan ketahanan daerah.

Arah kebijakan tersebut selanjutnya dijabarkan ke dalam program, kegiatan, dan subkegiatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Salatiga Tahun 2027 sebagaimana diuraikan pada Bab IV. Seluruh program, kegiatan, dan subkegiatan disusun dengan memperhatikan prioritas pembangunan daerah, kemampuan keuangan daerah, pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM), serta kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana yang adaptif terhadap perkembangan kondisi dan risiko bencana di Kota Salatiga sehingga mampu mendukung pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah secara efektif, efisien, dan berkelanjutan.

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana Kerja dan Pendanaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Salatiga Tahun 2027 merupakan penjabaran operasional dari tujuan, sasaran, dan arah kebijakan yang telah ditetapkan pada Bab III. Penyusunan program, kegiatan, dan subkegiatan dilaksanakan berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Renja Tahun 2025, analisis permasalahan dan isu strategis penyelenggaraan penanggulangan bencana, serta mengacu pada Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Salatiga Tahun 2025–2029 dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Salatiga Tahun 2027.

Penyusunan rencana kerja dan pendanaan dilakukan dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah, prioritas pembangunan daerah, pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub Urusan Bencana, serta mendukung pencapaian sasaran pembangunan daerah melalui penyelenggaraan penanggulangan bencana yang efektif, terpadu, adaptif, dan berkelanjutan.

Pada Tahun 2027 Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Salatiga melaksanakan 2 (dua) program, yang dijabarkan ke dalam 9 (sembilan) kegiatan dan 30 (tiga puluh) subkegiatan sebagai implementasi tugas dan fungsi perangkat daerah.

4.1 Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah

Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Salatiga Tahun 2027 disusun sebagai penjabaran operasional dari tujuan, sasaran, arah kebijakan, dan strategi perangkat daerah sebagaimana tertuang dalam Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Salatiga Tahun 2025–2029. Penyusunan program, kegiatan, dan subkegiatan juga memperhatikan hasil evaluasi pelaksanaan Renja Tahun 2025, arah kebijakan nasional dan daerah, prioritas pembangunan daerah, serta kemampuan keuangan daerah.

Paradigma penyelenggaraan penanggulangan bencana saat ini tidak hanya berfokus pada penanganan saat terjadi bencana (tanggap darurat), tetapi lebih mengutamakan upaya pengurangan risiko bencana melalui penyelenggaraan kegiatan pada tahap prabencana. Upaya tersebut diwujudkan melalui peningkatan kapasitas masyarakat, komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE), penyusunan dokumen kebencanaan, pelatihan dan simulasi, mitigasi bencana, penguatan kelembagaan, penyediaan sarana dan prasarana kebencanaan, serta pengembangan sistem informasi dan peringatan dini.

Pendekatan tersebut diharapkan mampu meningkatkan ketahanan daerah dan masyarakat dalam menghadapi ancaman bencana.

Dalam rangka mewujudkan tujuan tersebut, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Salatiga pada Tahun 2027 melaksanakan 2 (dua) program, yang dijabarkan ke dalam 9 (sembilan) kegiatan dan 30 (tiga puluh) subkegiatan.

A. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota merupakan program yang mendukung penyelenggaraan fungsi manajemen pemerintahan sehingga pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah dapat berjalan secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Program ini terdiri atas 5 (lima) kegiatan dan 15 (lima belas) subkegiatan, yaitu:

1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, terdiri atas 2 (dua) subkegiatan:

- a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah;
- b. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

.

2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, terdiri atas 2 (dua) subkegiatan:

- a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN;
- b. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN.

3. Administrasi Umum Perangkat Daerah, terdiri atas 6 (enam) subkegiatan:

- a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor;
- b. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga;
- c. Penyediaan Bahan Logistik Kantor;
- d. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan;
- e. Fasilitas Kunjungan Tamu;
- f. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD;

.

6. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, terdiri atas 3 (tiga) subkegiatan:

- a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat;
- b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik;

7. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, terdiri atas 5 (lima) subkegiatan:

- a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan;
- b. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional;
- c. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya;

B. Program Penanggulangan Bencana

Program Penanggulangan Bencana merupakan program utama Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Salatiga dalam penyelenggaraan pelayanan dasar Sub Urusan Bencana. Program ini terdiri atas 4 (empat) kegiatan dan 24 (dua puluh empat) subkegiatan yang mencakup upaya pencegahan, mitigasi, kesiapsiagaan, penanganan keadaan darurat, rehabilitasi, dan rekonstruksi pascabencana, yaitu:

1. Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota, terdiri atas 1 (satu) subkegiatan:
 - a. Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Ancaman Bencana).
2. Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana, terdiri atas 5 (lima) subkegiatan.
3. Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana, terdiri atas 4 (empat) subkegiatan.
4. Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana, terdiri atas 5 (lima) subkegiatan.

Rincian program, kegiatan, subkegiatan, indikator kinerja, target, lokasi, kelompok sasaran, kebutuhan pendanaan, sumber pendanaan, serta prakiraan maju Tahun 2028 disajikan pada Tabel 4.1 Rencana Kerja dan Pendanaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Salatiga Tahun 2027.

Tabel 4.1 Rencana Kerja dan Pendanaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Salatiga Tahun 2027

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2027				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2028	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								
1.05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN				4.532.169.000				3.281.964.331
1.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN KABUPATEN/KOTA	Persentase terlaksananya kegiatan pendukung urusan pemerintahan		100	2.224.915.000			100	1.788.964.331
		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah		88,25				88,50	
		Nilai SAKIP Perangkat Daerah		67				70	
1.05.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Meningkatnya kualitas perencanaan dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah		100	9.500.000			100	14.500.000
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Salatiga	3	2.000.000	DAU		3	2.000.000
1.05.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kota Salatiga	6	2.500.000	DAU		6	2.500.000

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2027				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2028	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	Kota Salatiga	58	2.500.000	DAU		58	5.000.000
	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Kota Salatiga	2	2.500.000	DAU		2	5.000.000
1.05.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase tercapainya layanan administrasi keuangan perangkat daerah		100	1.649.415.000			100	1.382.314.331
1.05.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Salatiga	12	1.635.000.000	DAU		12	1.367.899.331
1.05.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kota Salatiga	12	14.415.000	DAU		12	14.415.000
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase tercapainya layanan administrasi barang milik daerah pada Perangkat Daerah		100	14.000.000			100	7.000.000
	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Kota Salatiga	2	14.000.000	DAU		1	7.000.000
1.05.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase tercapainya layanan administrasi umum Perangkat Daerah		100	137.000.000			100	130.150.000
1.05.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kota Salatiga	1	7.500.000	DAU		1	7.500.000

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2027				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2028	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kota Salatiga	1	3.000.000	DAU		1	3.000.000
1.05.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Kota Salatiga	1	3.000.000	DAU		1	3.000.000
1.05.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kota Salatiga	3	30.000.000	DAU		3	22.500.000
1.05.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Kota Salatiga	2	6.000.000	DAU		2	6.500.000
1.05.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	Kota Salatiga	12	2.000.000	DAU		12	1.650.000
1.05.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kota Salatiga	4	3.000.000	DAU		6	6.000.000
1.05.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Salatiga	12	80.000.000	DAU		12	77.500.000
	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kota Salatiga	4	2.500.000	DAU		12	2.500.000
1.05.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase meningkatnya ketersediaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang memiliki nilai aset		100	60.000.000			100	40.000.000
1.05.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Kota Salatiga	4	60.000.000	DAU		3	40.000.000

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2027				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2028	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan Pemerintahan Daerah		100	76.800.000			100	81.850.000
1.05.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kota Salatiga	2	800.000	DAU		2	850.000
1.05.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kota Salatiga	12	40.000.000	DAU		12	45.000.000
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kota Salatiga	12	36.000.000	DAU		12	36.000.000
1.05.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase layanan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah		100	355.000.000			100	215.000.000
1.05.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Kota Salatiga	2	60.000.000	DAU		2	55.000.000
1.05.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kota Salatiga	8	90.000.000	DAU		8	70.000.000
1.05.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kota Salatiga	15	30.000.000	DAU		20	30.000.000
1.05.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kota Salatiga	1	75.000.000	DAU		1	60.000.000

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2027				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2028	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kota Salatiga	1	100.000.000	DAU		-	-
1.05.03	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Persentase Cakupan Penyebaran Informasi dan Edukasi Rawan Bencana		100	2.307.254.000			100	1.493.000.000
		Persentase Cakupan Layanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap bencana		100				100	
		Persentase Cakupan Layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana		100				100	
1.05.03.2.01	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Persentase terlaksananya layanan informasi rawan bencana Kabupaten/Kota		100	50.000.000			100	55.000.000
1.05.03.2.01.0007	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Ancaman Bencana)	Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota yang memperoleh sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi sesuai jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya selama 1 (satu) tahun	Kota Salatiga	300	50.000.000	DAU	Sosialisasi Edukasi Sekolah Aman Bencana Tingkat TK/RA/PAUD/SD/SMP/MTs	400	55.000.000
1.05.03.2.02	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Persentase terlaksananya layanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap bencana		100	1.669.754.000			100	1.008.000.000

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2027				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2028	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.05.03.2.02.0015	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota Kabupaten/Kota	Jumlah Peralatan Penyelamatan Diri bagi Individu Warga Negara, Keluarga, maupun Petugas sesuai dengan jenis ancaman bencana di kawasan tempat tinggalnya	Kota Salatiga	4	380.754.000	DAU	Kebutuhan Peralatan dalam penanganan bencana baik untuk di BPBD maupun relawan PB Kelurahan yang sudah terbentuk Kelurahan Tangguh Bencana	5	50.000.000
1.05.03.2.02.0018	Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota	Jumlah warga negara yang mengikuti gladi kesiapsiagaan untuk menguji efektivitas SOP dan keberfungsian sarana prasarana dalam pengendalian operasi penanganan darurat bencana (per jenisancaman) Kabupaten/Kota	Kota Salatiga	150	47.500.000	DAU		150	47.500.000
1.05.03.2.02.0019	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	Kota Salatiga	50	35.000.000	DAU		50	40.000.000
1.05.03.2.02.0020	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana	Jumlah kawasan rawan bencana (per jenis ancaman bencana) dan/atau kawasan-kawasan strategis Kabupaten/Kota yang memiliki mekanisme dan prosedur tetap kesiapsiagaan menghadapi bencana	Kota Salatiga	1	35.000.000	DAU		1	35.500.000

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2027				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2028	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.05.03.2.02.0021	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Rencana Kontijensi Kabupaten/Kota (per jenis ancaman bencana) sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun	Kota Salatiga	75	45.500.000	DAU		50	30.000.000
1.05.03.2.02.0022	Penyusunan Rencana Kontijensi Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Rencana Kontijensi Kabupaten/Kota (per jenis ancaman bencana) sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun	Kota Salatiga	1	150.000.000	DAU	Potensi Bencana Gempa Bumi yang diakibatkan dari Sesar Rawa Pening risiko tinggi (M.6,5-6,8 dan kedalaman 8-10 M), sehingga perlu menyusun Renkon Gempa Bumi	1	150.000.000
	Penyusunan Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana	Jumlah dokumen Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana (RPKB) Kabupaten/Kota sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun	Kota Salatiga	1	150.000.000	DAU		-	-
1.05.03.2.02.0026	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah laporan layanan pusat pengendalian operasi (pusdalops) dengan Maklumat Pelayanan yang sah dan legal sesuai dengan jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya	Kota Salatiga	12	776.000.000	DAU	Peningkatan kebutuhan kesiapsiagaan, penguatan sistem pengendalian operasi, penyesuaian standar layanan minimum (SPM), dan evaluasi risiko bencana yang semakin kompleks.	12	600.000.000
1.05.03.2.02.0028	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah warga negara termasuk kelompok rentandir kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota yang mengikuti pelatihanpencegahan dan mitigasi bencana	Kota Salatiga	2	50.000.000	DAU		2	55.000.000

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2027				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2028	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.05.03.2.03	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Persentase meningkatnya layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana		100	347.500.000			100	240.000.000
1.05.03.2.03.0002	Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen SK Penetapan Status Darurat Bencanadan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Kaji Cepat	Kota Salatiga	6	100.000.000	DAU		6	110.000.000
1.05.03.2.03.0003	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana	Kota Salatiga	20	50.000.000	DAU		20	55.000.000
	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur dalam penanganan keadaan darurat Kabupaten/Kota	Jumlah Aparatur SDM BPBD Kabupaten/Kota dan lintas perangkat daerah yang memiliki kemampuan penanganan keadaan darurat dalam aspek manajerial dan teknis	Kota Salatiga	50	100.000.000	DAU	Aparatur perlu pelatihan teknis, manajerial, dan koordinatif agar keputusan yang diambil efektif dan tetap sesuai SOP	25	25.000.000
1.05.03.2.03.0009	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Kota Salatiga	20	45.000.000	DAU		20	50.000.000

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2027				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2028	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Respon Cepat Bencana Non Alam Epidemi/Wabah Penyakit	Jumlah dokumen SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Investigasi KLB dan Epidemiologi Terpadu	Kota Salatiga	4	30.000.000	DAU		-	-
	Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	Jumlah Laporan Pelaksanaan Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana Kabupaten/Kota	Kota Salatiga	6	22.500.000	DAU		-	-
1.05.03.2.04	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Persentase tercapainya penataan sistem dasar penanggulangan bencana		100	240.000.000			100	245.000.000
	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana	Kota Salatiga	1	15.000.000	DAU		1	20.000.000
1.05.03.2.04.0005	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	Jumlah Laporan Hasil Binwas Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	Kota Salatiga	4	45.000.000	DAU		4	50.000.000
	Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah SDM aparatur penanggulangan bencana yang memiliki kompetensi	Kota Salatiga	20	20.000.000	DAU		20	25.000.000
	Bimbingan Teknis Pasca Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Aparatur BPBD Kabupaten/Kota dan lintas perangkat daerah Kabupaten/Kota yang memiliki kemampuan teknis dalam menyusun dokumen Pengkajian Kebutuhan Pascabencana	Kota Salatiga	20	25.000.000	DAU		20	30.000.000

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2027				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2028	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		(JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P)							
1.05.03.2.04.0010	Koordinasi penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	Jumlah penyelesaian kegiatan pascabencana di semua sektor sesuai berdasarkan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P) Kabupaten/Kota yang dilegalkan	Kota Salatiga	10	50.000.000	DAU		6	45.000.000
	Peningkatan partisipasi masyarakat dan dunia usaha dalam penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	Jumlah keterlibatan kelompok masyarakat dan dunia usaha dalam penanganan pascabencana Kabupaten/Kota meliputi Lembaga non pemerintah antara lain: lembaga filantropi, lembaga swadaya masyarakat, organisasi kemasyarakatan, organisasi sosial, organisasi keagamaan, organisasi relawan, perguruan tinggi, media massa dan dunia usaha yang telah terdaftar dan legal	Kota Salatiga	20	20.000.000	DAU	upaya peningkatan peran serta masyarakat dan kelompok masyarakat dalam aksi nyata penanganan pasca bencana baik pada tahapan rehabilitasi maupun pada tahapan rekonstruksi	-	-
1.05.03.2.04.0014	Penguatan Kelembagaan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah penyelesaian dokumen Maklumat Pelayanan sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun	Kota Salatiga	4	45.000.000	DAU		4	50.000.000

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2027				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2028	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Penyusunan Kajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P) Kabupaten/Kota	Jumlah penyelesaian dokumen Pengkajian Kebutuhan Pascabencana dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kotasampai dengan dinyatakan sah dan legal paling lama dalam 1 (satu) tahun	Kota Salatiga	4	20.000.000	DAU		4	25.000.000

Sumber:

Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Salatiga Tahun 2025–2029.

Rancangan Akhir Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Salatiga Tahun 2027.

Berdasarkan Tabel 4.1 dapat diketahui bahwa seluruh program, kegiatan, dan subkegiatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Salatiga Tahun 2027 telah disusun sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah serta diarahkan untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Salatiga Tahun 2025–2029. Selain mendukung pencapaian indikator kinerja perangkat daerah, pelaksanaan program dan kegiatan tersebut juga berkontribusi terhadap pencapaian prioritas pembangunan daerah, pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM), penguatan ketahanan daerah, pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs), serta pengembangan inovasi daerah.

4.2 Dukungan Program, Kegiatan, dan Subkegiatan terhadap Kebijakan Tematik Pembangunan Daerah

Dalam penyusunan Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Salatiga Tahun 2027, program, kegiatan, dan subkegiatan tidak hanya diarahkan untuk mencapai tujuan dan sasaran perangkat daerah, tetapi juga disusun agar selaras dengan kebijakan tematik pembangunan daerah sebagaimana menjadi prioritas dalam perencanaan pembangunan Kota Salatiga. Penyelarasan tersebut dilakukan agar seluruh program dan kegiatan mampu memberikan kontribusi yang nyata terhadap pencapaian sasaran pembangunan daerah, peningkatan kualitas pelayanan kebencanaan, serta terwujudnya Kota Salatiga yang tangguh terhadap bencana.

Kebijakan tematik yang menjadi perhatian dalam penyusunan Renja Tahun 2027 meliputi dukungan terhadap prioritas pembangunan daerah, pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM), pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs), penguatan ketahanan daerah terhadap risiko bencana, pengembangan inovasi daerah, serta peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan.

Keterkaitan program, kegiatan, dan subkegiatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Salatiga Tahun 2027 terhadap kebijakan tematik pembangunan daerah disajikan pada Tabel 4.2 berikut.

Tabel 4.2 Program, Kegiatan, Dan Subkegiatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Salatiga Tahun 2027 Terhadap Kebijakan Tematik Pembangunan Daerah

No.	Kebijakan Tematik	Program/Kegiatan Pendukung	Kontribusi
1	Prioritas Pembangunan Daerah	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana; Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana; Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Mendukung pencapaian sasaran RPJMD dan RKPD Kota Salatiga melalui pengurangan risiko bencana dan peningkatan ketahanan daerah.
2	Standar Pelayanan Minimal (SPM)	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota; Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana; Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Mendukung pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub Urusan Bencana.
3	SDGs Tujuan 11 (Kota dan Permukiman Berkelanjutan)	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	Mendukung terwujudnya kota dan permukiman yang aman, tangguh, inklusif, dan berkelanjutan.
4	SDGs Tujuan 13 (Penanganan Perubahan Iklim)	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana; Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Mendukung adaptasi dan mitigasi perubahan iklim melalui pengurangan risiko bencana.
5	Penguatan Ketahanan Daerah	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana; Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Meningkatkan kapasitas pemerintah daerah, masyarakat, relawan, dan kelembagaan dalam menghadapi bencana.
6	Inovasi Daerah	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	Mendukung pengembangan inovasi Perusahaan Tangguh Bencana (PERTANA) melalui kolaborasi pentahelix dan partisipasi dunia usaha.
7	Tata Kelola Pemerintahan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, akuntabel, dan mendukung penyelenggaraan pelayanan kebencanaan.

Sumber: Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Salatiga Tahun 2025–2029; RKPD Kota Salatiga Tahun 2027; dan diolah oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Salatiga Tahun 2027.

Berdasarkan Tabel 4.2, seluruh program, kegiatan, dan subkegiatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Salatiga Tahun 2027 telah disusun selaras dengan kebijakan tematik pembangunan daerah. Keterkaitan tersebut menunjukkan bahwa penyelenggaraan penanggulangan bencana tidak hanya berorientasi pada pencapaian target kinerja perangkat daerah, tetapi juga mendukung prioritas pembangunan daerah, pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM), pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs), penguatan ketahanan daerah, pengembangan inovasi daerah melalui Perusahaan Tangguh Bencana (PERTANA), serta peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan.

A. Dukungan terhadap Prioritas Pembangunan Daerah

Program Penanggulangan Bencana diarahkan untuk mendukung pencapaian prioritas pembangunan daerah melalui penyelenggaraan kegiatan pencegahan, mitigasi, kesiapsiagaan, penanganan keadaan darurat, rehabilitasi, dan rekonstruksi. Pelaksanaan kegiatan tersebut diharapkan mampu mengurangi tingkat risiko bencana, meningkatkan kapasitas daerah, serta memperkuat ketahanan masyarakat dalam menghadapi potensi bencana.

B. Dukungan terhadap Standar Pelayanan Minimal (SPM)

Program dan kegiatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Salatiga diarahkan untuk memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub Urusan Bencana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemenuhan pelayanan dasar tersebut diwujudkan melalui penyelenggaraan pelayanan informasi rawan bencana, pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana, serta pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana secara cepat, tepat, dan terukur.

C. Dukungan terhadap Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs)

Program Penanggulangan Bencana memberikan kontribusi terhadap pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs), khususnya Tujuan 11 (Kota dan Permukiman yang Berkelanjutan) melalui pembentukan dan pembinaan Kelurahan Tangguh Bencana, pengembangan Satuan Pendidikan Aman Bencana (SPAB), penyelenggaraan komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE), serta pelaksanaan pelatihan dan simulasi kebencanaan.

Selain itu, program dan kegiatan juga mendukung Tujuan 13 (Penanganan Perubahan Iklim) melalui pelaksanaan mitigasi bencana, pengurangan risiko bencana, penyusunan kajian risiko bencana, penguatan

sistem peringatan dini, serta peningkatan kapasitas pemerintah daerah dan masyarakat dalam menghadapi dampak perubahan iklim.

D. Dukungan terhadap Penguatan Ketahanan Daerah

Penguatan ketahanan daerah diwujudkan melalui peningkatan kapasitas pemerintah daerah, masyarakat, relawan, dunia usaha, dan seluruh pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana. Pendekatan tersebut dilakukan secara terpadu mulai dari tahap prabencana, tanggap darurat, hingga pascabencana guna meningkatkan kesiapsiagaan, mengurangi kerentanan, serta memperkuat kemampuan daerah dalam menghadapi ancaman bencana.

E. Dukungan terhadap Inovasi Daerah

Dalam rangka meningkatkan kualitas penyelenggaraan penanggulangan bencana, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Salatiga mengembangkan inovasi Perusahaan Tangguh Bencana (PERTANA). Inovasi ini mendorong keterlibatan dunia usaha dalam upaya pengurangan risiko bencana melalui pendekatan kolaborasi pentahelix, sehingga mampu meningkatkan kesiapsiagaan perusahaan, memperkuat jejaring kemitraan, mendukung pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM), serta memperkuat ketahanan daerah terhadap risiko bencana.

F. Dukungan terhadap Tata Kelola Pemerintahan

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah mendukung peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan melalui penyelenggaraan perencanaan, penganggaran, pengelolaan keuangan, administrasi umum, pengelolaan barang milik daerah, administrasi kepegawaian, evaluasi kinerja, serta pemanfaatan teknologi informasi. Dukungan tersebut diharapkan mampu mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, akuntabel, dan berorientasi pada peningkatan kualitas pelayanan publik.

Berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa seluruh program, kegiatan, dan subkegiatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Salatiga Tahun 2027 telah disusun secara terpadu untuk mendukung kebijakan tematik pembangunan daerah, sehingga tidak hanya berorientasi pada pencapaian target kinerja perangkat daerah, tetapi juga memberikan kontribusi terhadap pencapaian prioritas pembangunan daerah, pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM), pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs), penguatan ketahanan daerah terhadap risiko bencana, pengembangan inovasi daerah, serta peningkatan kualitas tata

kelola pemerintahan. Dengan demikian, pelaksanaan program, kegiatan, dan subkegiatan Tahun 2027 diharapkan mampu mewujudkan penyelenggaraan penanggulangan bencana yang lebih efektif, kolaboratif, adaptif, dan berkelanjutan.

BAB V

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Kinerja penyelenggaraan bidang urusan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Salatiga Tahun 2027 merupakan target kinerja yang akan dicapai dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat pada Sub Urusan Bencana sebagai penjabaran pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2027. Penetapan target kinerja tersebut mengacu pada tujuan, sasaran, arah kebijakan, serta target yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Salatiga Tahun 2025–2029 dengan memperhatikan hasil evaluasi pelaksanaan Renja Tahun 2025.

Evaluasi pelaksanaan Renja Tahun 2025 menjadi dasar dalam mengidentifikasi capaian kinerja, hambatan, tantangan, serta peluang perbaikan sehingga target kinerja Tahun 2027 dapat ditetapkan secara lebih realistis, terukur, dan berorientasi pada peningkatan kualitas penyelenggaraan penanggulangan bencana. Melalui target kinerja tersebut diharapkan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Salatiga mampu mendukung pencapaian sasaran pembangunan daerah, meningkatkan kualitas pelayanan kebencanaan, memperkuat ketahanan daerah terhadap risiko bencana, serta meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana.

5.1 Indikator Kinerja Utama (IKU)

Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Salatiga Tahun 2027 merupakan ukuran keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran strategis perangkat daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang penanggulangan bencana. IKU disusun berdasarkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Salatiga Tahun 2025–2029 serta memperhatikan hasil evaluasi pelaksanaan Renja Tahun 2025 sebagai dasar penyempurnaan target kinerja Tahun 2027.

Penetapan IKU Tahun 2027 diarahkan untuk mengukur keberhasilan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Salatiga dalam mewujudkan menurunnya risiko bencana melalui ketahanan daerah terhadap perubahan iklim, dengan sasaran meningkatnya pemahaman dan kesadaran masyarakat terhadap risiko bencana serta meningkatnya kapasitas daerah dalam penanggulangan bencana.

Selanjutnya target Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Salatiga Tahun 2027 disajikan pada Tabel 5.1.

Tabel 5.1 Target Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Salatiga Tahun 2027

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Target 2027
1	Menurunnya risiko bencana melalui ketahanan daerah terhadap perubahan iklim	Indeks Risiko Bencana (IRB)	72,89–71,67
2	Menurunnya risiko bencana melalui ketahanan daerah terhadap perubahan iklim	Indeks Ketahanan Daerah (IKD)	0,72
3	Meningkatnya pemahaman dan kesadaran masyarakat terhadap risiko bencana	Jumlah warga negara yang mendapatkan sosialisasi, komunikasi, informasi, edukasi (KIE), simulasi, dan informasi rawan bencana	1.364 Orang
4	Meningkatnya kapasitas daerah dalam penanggulangan bencana	Pengkajian risiko bencana dan perencanaan secara terpadu	1 Dokumen
5	Meningkatnya kapasitas daerah dalam penanggulangan bencana	Peningkatan efektivitas pencegahan dan mitigasi bencana	100%
6	Meningkatnya kapasitas daerah dalam penanggulangan bencana	Jumlah korban yang berhasil dievakuasi dan diselamatkan	8.341 Orang
7	Meningkatnya kapasitas daerah dalam penanggulangan bencana	Pengembangan sistem dasar dan pemulihan pascabencana	100%

Sumber : Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Salatiga Tahun 2025–2029.

Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Salatiga Tahun 2025.

5.2 Indikator Kinerja Kunci (IKK)

Indikator Kinerja Kunci (IKK) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Salatiga Tahun 2027 merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur keberhasilan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat pada Sub Urusan Bencana sesuai dengan kewenangan pemerintah daerah. Penetapan IKK mengacu pada Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Salatiga Tahun 2025–2029, Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub Urusan Bencana, serta hasil evaluasi pelaksanaan Renja Tahun 2025.

Target IKK Tahun 2027 difokuskan pada pelayanan dasar bidang kebencanaan yang secara langsung diterima masyarakat, meliputi pelayanan informasi rawan bencana, pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana, serta pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana.

Selanjutnya target Indikator Kinerja Kunci (IKK) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Salatiga Tahun 2027 disajikan pada Tabel 5.2.

Tabel 5.2 Target Indikator Kinerja Kunci (IKK) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Salatiga Tahun 2027

No	Indikator Kinerja Kunci	Satuan	Capaian Tahun 2025	Target Tahun 2027	Target Akhir Renstra
1	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	Orang	1.244	1.364	1.544
2	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Orang	735	805	910
3	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Orang	8.684	8.341	7.852

Sumber :

- Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Salatiga Tahun 2025–2029.
- Permendagri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal.
- Permendagri Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Bencana Kabupaten/Kota.
- Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Salatiga Tahun 2025.

Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Kunci (IKK) sebagaimana disajikan pada Tabel 5.1 dan Tabel 5.2 menjadi dasar dalam pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pengukuran kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Salatiga Tahun 2027. Pencapaian target-target tersebut diharapkan mampu mendukung penyelenggaraan penanggulangan bencana yang efektif, efisien, akuntabel, adaptif, dan berkelanjutan, meningkatkan kualitas pelayanan kebencanaan kepada masyarakat, memperkuat ketahanan daerah terhadap risiko bencana, serta mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Salatiga Tahun 2025–2029 dan sasaran pembangunan daerah Kota Salatiga..

BAB VI PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Salatiga Tahun 2027 merupakan dokumen perencanaan tahunan yang disusun sebagai penjabaran dari Rencana Strategis (Renstra) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Salatiga Tahun 2025–2029 serta mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Salatiga Tahun 2027. Renja ini menjadi pedoman dalam pelaksanaan program, kegiatan, dan subkegiatan selama Tahun Anggaran 2027 untuk mendukung pencapaian tujuan, sasaran, dan arah kebijakan pembangunan daerah di bidang penanggulangan bencana.

Penyusunan Renja Tahun 2027 telah memperhatikan hasil evaluasi pelaksanaan Renja Tahun 2025, target kinerja yang ditetapkan dalam Renstra BPBD Kota Salatiga Tahun 2025–2029, pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub Urusan Bencana, isu strategis daerah, serta dinamika kebijakan nasional dan daerah. Selain itu, Renja ini juga mengakomodasi penguatan kolaborasi pentahelix melalui inovasi Perusahaan Tangguh Bencana (PERTANA) sebagai implementasi Sinergitas Aksi Siaga Bencana (SIGAB) dalam rangka meningkatkan kapasitas dunia usaha sebagai bagian dari upaya pengurangan risiko bencana.

Pelaksanaan Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Salatiga Tahun 2027 diharapkan mampu meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat melalui penyelenggaraan penanggulangan bencana yang lebih efektif, efisien, terpadu, transparan, akuntabel, dan berkelanjutan sehingga mendukung terwujudnya Kota Salatiga yang tangguh terhadap bencana.

6.1 Kaidah Pelaksanaan

Dalam rangka mewujudkan pencapaian target kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Salatiga Tahun 2027, pelaksanaan Renja berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan serta kebijakan pembangunan daerah. Adapun kaidah pelaksanaan Renja adalah sebagai berikut:

1. Seluruh program, kegiatan, dan subkegiatan dilaksanakan sesuai tugas dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Salatiga serta mengacu pada Renstra BPBD Kota Salatiga Tahun 2025–2029 dan RKPD Kota Salatiga Tahun 2027.

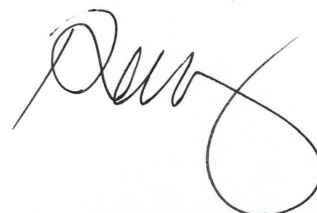
2. Pelaksanaan program dan kegiatan dilaksanakan secara efektif, efisien, transparan, akuntabel, partisipatif, dan berorientasi pada peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
3. Pelaksanaan program dan kegiatan mengutamakan koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan sinergi dengan perangkat daerah, instansi vertikal, TNI, Polri, dunia usaha, perguruan tinggi, organisasi kemasyarakatan, relawan, media, dan seluruh pemangku kepentingan sesuai pendekatan pentahelix.
4. Pelaksanaan kegiatan diarahkan untuk mendukung pencapaian target Indikator Kinerja Utama (IKU), Indikator Kinerja Kunci (IKK), Standar Pelayanan Minimal (SPM), serta sasaran pembangunan daerah.
5. Pengembangan inovasi Perusahaan Tangguh Bencana (PERTANA) dilaksanakan secara berkelanjutan sebagai bagian dari upaya peningkatan kesiapsiagaan, pengurangan risiko bencana, dan penguatan ketahanan daerah melalui kolaborasi dengan dunia usaha.

6.2 Pengendalian dan Evaluasi

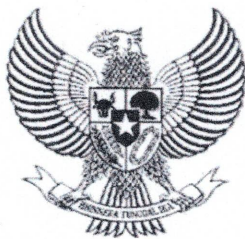
Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Salatiga Tahun 2027 dilaksanakan secara berkala untuk memastikan ketercapaian target kinerja, efektivitas pelaksanaan program, kegiatan, dan subkegiatan, serta kesesuaiannya dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Hasil pengendalian dan evaluasi menjadi dasar dalam melakukan perbaikan pelaksanaan program dan kegiatan, penyempurnaan kebijakan, penyusunan laporan kinerja perangkat daerah, serta penyusunan dokumen perencanaan pada tahun berikutnya. Melalui pengendalian dan evaluasi yang berkesinambungan diharapkan penyelenggaraan penanggulangan bencana di Kota Salatiga semakin adaptif, responsif, dan mampu memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat.

WALI KOTA SALATIGA,



ROBBY HERNAWAN



WALI KOTA SALATIGA

KEPUTUSAN WALI KOTA SALATIGA
NOMOR 000.7.2 / 273 / 2026

TENTANG
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2027

WALI KOTA SALATIGA,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 142 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2027;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang;

4. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 14 Tahun 2021;

5. Peraturan Wali Kota Salatiga Nomor 12 Tahun 2026 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2027;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :
KESATU : Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2027, dengan sistematika terdiri atas:

a. Bab I : Pendahuluan;

b. Bab II : Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025;

a. Bab III : Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan; dan

b. Bab IV : Penutup.



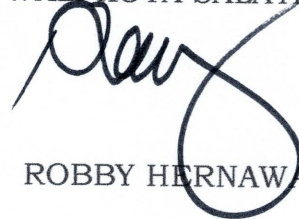
- KEDUA : Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU Keputusan ini tercantum dalam Lampiran sebagai berikut:
- a. Lampiran I : Rencana Kerja Sekretariat Daerah;
 - b. Lampiran II : Rencana Kerja Sekretariat DPRD;
 - c. Lampiran III : Rencana Kerja Inspektorat Daerah;
 - d. Lampiran IV : Rencana Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah;
 - e. Lampiran V : Rencana Kerja Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah;
 - f. Lampiran VI : Rencana Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
 - g. Lampiran VII : Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
 - h. Lampiran VIII : Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
 - i. Lampiran IX : Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Pelindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
 - j. Lampiran X : Rencana Kerja Dinas Pendidikan;
 - k. Lampiran XI : Rencana Kerja Dinas Kesehatan;
 - l. Lampiran XII : Rencana Kerja Dinas Sosial;
 - m. Lampiran XIII : Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja;
 - n. Lampiran XIV : Rencana Kerja Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman;
 - o. Lampiran XV : Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup;
 - p. Lampiran XVI : Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 - q. Lampiran XVII : Rencana Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;
 - r. Lampiran XVIII : Rencana Kerja Dinas Kepemudaan dan Olahraga;
 - s. Lampiran XIX : Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 - t. Lampiran XX : Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika;
 - u. Lampiran XXI : Rencana Kerja Dinas Perdagangan;
 - v. Lampiran XXII : Rencana Kerja Dinas Pangan dan Pertanian;
 - w. Lampiran XXIII : Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
 - x. Lampiran XXIV : Rencana Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
 - y. Lampiran XXV : Rencana Kerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata;
 - z. Lampiran XXVI : Rencana Kerja Dinas Perhubungan;
 - aa. Lampiran XXVII : Rencana Kerja Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja;
 - bb. Lampiran XXVIII : Rencana Kerja Kecamatan Argomulyo;
 - cc. Lampiran XXIX : Rencana Kerja Kecamatan Sidorejo;
 - dd. Lampiran XXX : Rencana Kerja Kecamatan Tingkir; dan
 - ee. Lampiran XXXI : Rencana Kerja Kecamatan Sidomukti.



- KETIGA : Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU Keputusan ini menjadi pedoman bagi Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kota Salatiga
pada tanggal 10 Agustus 2026

WALI KOTA SALATIGA,



ROBBY HERNAWAN

Tembusan:

1. Inspektur Kota Salatiga;
2. Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Salatiga;
3. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Salatiga;
4. Kepala Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Salatiga.

